

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintahan Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan Apbdes*. Yogyakarta: Deepublish Digital. [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Chabib Soleh, H. R. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- HAW. Widjaja. (2014). *Otonomi Desa* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_ Widjaja. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh* (1st ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2020). *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Maria Erni Surasih. (2006). *Pemerintahan DEsa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Mui'z Raharjo. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Numan. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis. (n.d.). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayuni Rauf, S. M. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zafana Publishing.
- Rudy. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Tim Prima Pena. (n.d.). *Kamus Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.

### B. Jurnal :

- Iznan Habib Kashogi, Dasril Radjab, Bustanuddin. (2022). Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Limbago Journal of Constitutional Law*, 2(1), 21–34.

- Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Mardiana. (2017). Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten lkm,Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 35–42.
- Saptomo, D. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SEI GOLANG KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU Oleh. *Jom Fisip*, 4(1), 5–24. <https://media.neliti.com/media/publications/134467-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.pdf>
- Yarni, M., Kosariza, K., & Irwandi, I. (2019). Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 198–205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5539)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

Kabupaten Kerinci, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pengalokasian, Peny aluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahu 2022

**D. Skripsi-Skripsi :**

Choiri Azizah yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, Universitas Muhammadiyah Magelang 2020.

Winda Desiana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Universitas Muhamadiyah Mataram 2022.

Yanti Abbas yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, Institut Agama Islam Negari Palopo 2022.